AL-WAARITS: Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial
Vol. 3, No. 2, Oktober 2026, pp. 152∼162
E-ISSN: 2964-9897 | P-ISSN: 2963-1955

The Implementation of Sharia Based Governance in Enhancing Ethical Public Administration

Implementasi Tata Kelola Berbasis Syariah dalam Meningkatkan Etika Administrasi Publik

Fitra Putri Oganda[1*], Sheila Aulia Anjani[2], Ardivan Avandi[1], Ammar Hussein[3]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Raharja, Indonesia
[2]Departemen Ekonomi dan Bisnis, Casindo Group, Indonesia
[3]Departemen Agama Islam, Ilearning Incorporation, Estonia
[1]fitra.putri@raharja.info, [2]sheila@raharja.info, [1]ardivan@raharja.info, [3]ammar.hussein@ilearning.ee
***Penulis Koresponden**

Article Info

Article history:

Submit Agustus 24, 2026
Revisi Oktober 29, 2026
Diterima Oktober 30, 2026
Diterbitkan Oktober 31, 2026

Kata Kunci:
Administrasi Publik
Amanah
Akuntabilitas
Keadilan
Transparansi

Keywords:
Accountability
Justice
Public Administration
Transparency
Trustworthiness

ABSTRACT

This study is motivated by the growing demand for transparency, accountability, and integrity in public administration amid various challenges related to bureaucratic ethics, highlighting the importance of introducing Sharia-based governance as a normative and systemic alternative to strengthening ethical standards in public administration. **The object of this study** is the implementation of Sharia-based governance principles, including justice, trustworthiness, transparency, responsibility, and an orientation toward the public good, in public administration practices in Indonesia. **This study employs** a qualitative approach using a literature review design and conceptual analysis of relevant regulations, scholarly literature, and policy documents. The data are then analyzed using content analysis techniques to identify the relationship between Sharia principles and modern public administration ethics standards. **The conceptual analysis** indicates that the integration of Sharia values into public governance has the potential, in theoretical and proportionate terms, to contribute to strengthening a culture of integrity, preventing corruption, improving performance accountability, and establishing a public service system oriented toward the public good. **This study concludes** that the implementation of Sharia-based governance is not only normatively relevant in the context of Muslim societies but also compatible with the universal principles of good governance. Therefore, it has the potential to serve as an ethical and strategic model for sustainable public administration reform.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam administrasi publik di tengah berbagai permasalahan etika birokrasi, sehingga penting untuk menghadirkan tata kelola berbasis syariah sebagai alternatif normatif dan sistemik dalam memperkuat etika administrasi publik. **Objek penelitian ini** adalah implementasi prinsip-prinsip tata kelola berbasis syariah yang meliputi keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan dalam praktik administrasi publik di Indonesia. **Metode yang digunakan** adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan analisis konseptual terhadap berbagai regulasi, literatur

ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi keterkaitan antara prinsip syariah dan standar etika administrasi publik modern. **Hasil analisis konseptual** menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola publik secara teoretis dan proporsional berpotensi berkontribusi terhadap penguatan budaya integritas, pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pembentukan sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. **Penelitian ini menyimpulkan** bahwa implementasi tata kelola berbasis syariah tidak hanya relevan secara normatif dalam konteks masyarakat Muslim, tetapi juga kompatibel dengan prinsip *good governance* secara universal, sehingga berpotensi menjadi model etis dan strategis dalam reformasi administrasi publik yang berkelanjutan.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.



DOI: https://doi.org/10.34306/alwaarits.v3i2.1242
This is an open-access article under the CC-BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
©Authors retain all copyrights

1. PENDAHULUAN

Reformasi administrasi publik di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik [1, 2]. Namun demikian, berbagai persoalan etika birokrasi seperti penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, konflik kepentingan, serta rendahnya integritas aparatur masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi struktural dan regulatif semata belum sepenuhnya mampu membangun kultur etis dalam administrasi publik. Diperlukan pendekatan normatif dan nilai yang lebih mendasar untuk memperkuat fondasi moral aparatur negara. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, tata kelola berbasis syariah menjadi sangat signifikan untuk dikaji karena menyediakan landasan teologis dan rasionalitas normatif yang kokoh dalam mewujudkan etika administrasi publik [3, 4]. Secara mendasar, hubungan ini berpijak pada penegakan amanah dan keadilan sebagaimana diintrodusir dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa 4: 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

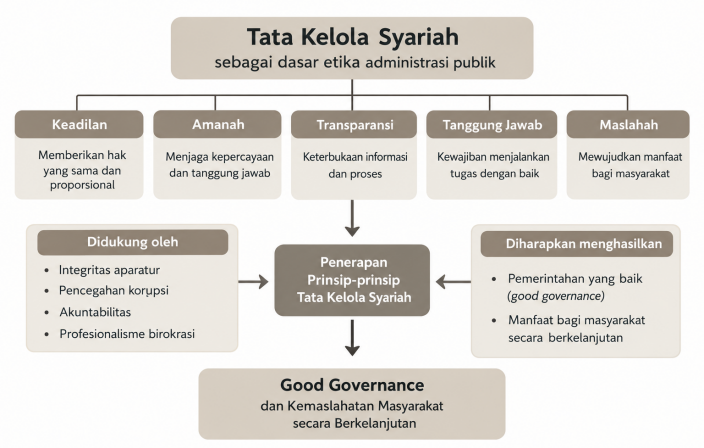
(QS. An-Nisa 4: 58)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat tersebut memerintahkan penyampaian amanah kepada yang berhak serta penetapan hukum atau kebijakan secara adil. Prinsip ini diperkuat oleh Hadis Nabi SAW (HR. Bukhari dan Muslim), yang menegaskan bahwa setiap pejabat atau aparatur merupakan pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya [5, 6]. Dalam perspektif maqasid al-shariah, tata kelola syariah berfungsi sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan publik (*hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-'aql*) dalam proses perumusan kebijakan dan pelayanan publik. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*'adl*), amanah, transparansi (*syafafiyyah*), dan tanggung jawab (*mas'uliyyah*) tidak sekadar norma dogmatis, melainkan memiliki dimensi operasional yang kompatibel dengan indikator modern etika publik dan *good governance*. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi tata kelola berbasis syariah menjadi penting dalam upaya merumuskan model administrasi publik yang tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga kokoh secara etis.

Tata kelola berbasis syariah merupakan internalisasi prinsip maqasid al-shariah dalam administrasi publik untuk mewujudkan keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat [7, 8]. Pendekatan ini menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat dan Tuhan, sehingga dapat membangun kesadaran etis aparatur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik, pengelolaan sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan pelayanan publik, serta mengkaji relevansi dan kesesuaiannya dengan konsep *good governance* [9, 10]. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis konseptual, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan administrasi publik berbasis nilai serta kontribusi praktis dalam memperkuat integritas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implementasinya tetap perlu memperhatikan pluralitas masyarakat, keselarasan dengan sistem hukum nasional, serta profesionalisme aparatur agar tercipta tata kelola pemerintahan yang beretika, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penerapan Tata Kelola Syariah untuk Etika Administrasi Publik

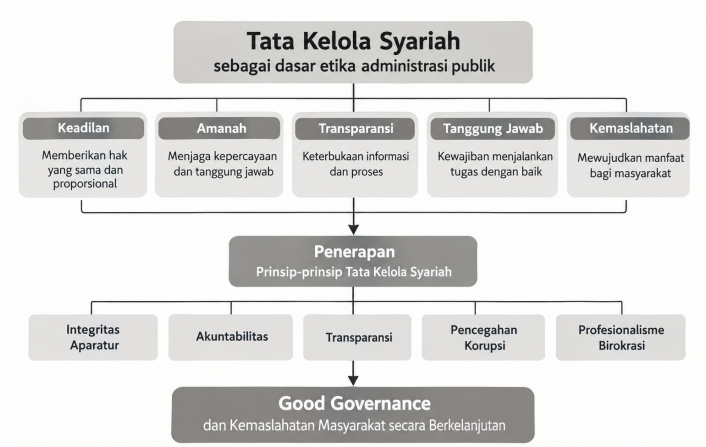
Gambar 1 menunjukkan penerapan tata kelola syariah untuk etika administrasi publik melalui prinsip keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan maslahah sebagai fondasi normatif penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab aparatur, sekaligus mendorong penguatan integritas, pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan pembentukan budaya organisasi yang beretika, dengan tetap memperhatikan tantangan pluralitas masyarakat, serta profesionalisme birokrasi agar penerapan nilai-nilai syariah berlangsung secara substantif dan tidak sekadar simbolik dalam mewujudkan *good governance* dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan, yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) sebagai tujuan utama penguatan institusi publik yang efektif, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi, serta berkaitan dengan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) dalam mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif serta SDG 10 (*Reduced Inequalities*) dalam mengurangi ketimpangan akses terhadap pelayanan publik dan mendorong keadilan sosial [11, 12].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Tata Kelola Berbasis Syariah dalam Perspektif Kontemporer

Tata kelola berbasis syariah merupakan konsep pengelolaan organisasi dan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip normatif Islam, seperti keadilan (*'adl*), amanah, tanggung jawab (*mas'uliyyah*), transparansi (*tabligh*), serta orientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) [13, 14]. Dalam perkembangan literatur mutakhir, tata kelola syariah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan hukum Islam semata, melainkan sebagai sistem nilai yang membentuk struktur, proses, kebijakan, dan budaya organisasi secara menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan etis dalam menjalankan kewenangan, menetapkan kebijakan, serta melaksanakan tanggung jawab kelembagaan. Studi terbaru menunjukkan bahwa tata kelola syariah memiliki dimensi etis yang kuat karena mengintegrasikan akuntabilitas vertikal kepada Tuhan dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat, sehingga setiap keputusan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga nilai moral dan dampaknya terhadap kepentingan publik [15, 16]. Dalam konteks institusi publik, pendekatan ini relevan untuk membangun model *gover-*

nance yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga pada internalisasi nilai moral dalam perilaku aparatur dan proses pengambilan keputusan [17, 18]. Penelitian kontemporer juga menegaskan bahwa prinsip maqasid al-shariah memberikan kerangka strategis dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian kemaslahatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tata kelola berbasis syariah berpotensi memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, konsep ini dapat dikontekstualisasikan dalam sistem administrasi publik modern tanpa mengabaikan prinsip *universal good governance*, profesionalisme aparatur, serta kebutuhan masyarakat yang beragam [19, 20].



Gambar 2. Konsep Tata Kelola Berbasis Syariah dalam Perspektif Kontemporer

Gambar 2 menampilkan kerangka konseptual tata kelola berbasis syariah dalam perspektif kontemporer yang menempatkan prinsip-prinsip normatif Islam sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern [21, 22]. Pada bagian tengah visualisasi terlihat figur aparatur publik yang berdiri di atas timbangan keadilan sebagai simbol keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Di sekelilingnya ditampilkan nilai-nilai utama seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang menggambarkan dimensi etik dan moral dalam tata kelola. Bagian bawah ilustrasi menegaskan integrasi nilai syariah ke dalam tata kelola pemerintahan modern melalui penguatan integritas, akuntabilitas, dan transparansi sebagai elemen kunci *good governance* [23, 24]. Secara keseluruhan, tata kelola berbasis syariah merupakan model yang selaras dengan administrasi publik modern dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

2.2. Etika Administrasi Publik dan Tantangan Integritas Birokrasi

Etika administrasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun institusi pemerintahan yang kredibel dan dipercaya masyarakat [25, 26]. Literatur terbaru menyoroti bahwa tantangan terbesar birokrasi modern adalah krisis integritas yang ditandai dengan korupsi, konflik kepentingan, serta lemahnya budaya akuntabilitas. Reformasi administratif yang berfokus pada prosedur dan digitalisasi belum sepenuhnya efektif apabila tidak disertai penguatan nilai etis dalam organisasi. Penelitian pasca-2022 menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai dan budaya organisasi lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan kontrol formal semata. Oleh karena itu, integrasi nilai religius dalam sistem administrasi publik dipandang sebagai salah satu strategi alternatif dalam memperkuat etika aparatur [27, 28]. Dalam konteks ini, tata kelola berbasis syariah menawarkan pendekatan normatif yang menekankan kesadaran moral intrinsik, bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi eksternal.

2.3. Integrasi Nilai Maqasid al Shariah dalam *Good Governance*

Konsep *good governance* yang dikembangkan dalam literatur global menekankan prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, dan supremasi hukum [29, 30]. Namun, sejumlah kajian terbaru mengkritik pendekatan *good governance* konvensional karena cenderung bersifat teknokratis-instrumental dan kurang memperhitungkan dimensi etis-spiritual aparatur. Untuk memperkuat sintesis teoretis, penelitian ini mengintegrasikan Teori Administrasi Publik Modern (*New Public Service dan Public Value Theory*) dengan Kerangka

Maqasid al-Shariah. Dalam perspektif administrasi publik, kepublikan (*publicness*) berfokus pada penciptaan nilai publik (*public value*) dan pelayanan warga negara (*serving citizens*) [31, 32]. Sementara dalam keilmuan Islam, penciptaan *public value* tersebut selaras secara substantif dengan pemenuhan maslahah publik (*al-maslahah al-'ammah*) yang ditopang oleh pilar maqasid al-shariah (perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan martabat). Integrasi analitis ini menempatkan prinsip syariah bukan sekadar sebagai dogma agama eksternal, melainkan sebagai sistem nilai pengendali intrinsik (*intrinsic governance control mechanism*) yang memperkaya indikator *good governance* seperti mengubah *accountability administrative* menjadi pertanggungjawaban ganda [33, 34]. Dengan demikian, dialektika teoretis ini menghasilkan kerangka kerja *public administrative ethics* yang kokoh secara manajerial sekaligus berakar kuat pada nilai keislaman.

2.4. Model Implementasi Tata Kelola Syariah dalam Institusi Publik

Implementasi tata kelola berbasis syariah dalam institusi publik memerlukan strategi sistematis melalui reformasi regulasi, penguatan budaya organisasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, konsistensi pengawasan, serta partisipasi masyarakat untuk menjamin legitimasi kebijakan publik [35, 36]. Dengan mengintegrasikan dimensi normatif berupa nilai dan prinsip, dimensi struktural berupa aturan dan kelembagaan, serta dimensi kultural berupa internalisasi etika dalam perilaku aparatur guna meningkatkan kualitas etika administrasi publik secara berkelanjutan dan sistemik. Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa tata kelola berbasis syariah memiliki relevansi teoretis dan praktis dalam menjawab tantangan etika administrasi publik kontemporer. Meskipun penelitian terdahulu telah mendiskusikan etika Islam dan *good governance* secara umum, mayoritas studi tersebut masih terbatas pada kajian normatif tunggal atau pengawasan kepatuhan institusi keuangan. Kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas dari penelitian ini terletak pada formulasi Model Integrasi Tiga Lapisan (Normatif, Implementatif, dan Evaluatif) yang memadukan prinsip maqasid al-shariah secara holistik ke dalam indikator etika administrasi publik modern (seperti akuntabilitas, transparansi, dan anti-korupsi) dalam satu kerangka kerja operasional birokrasi publik [37, 38]. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan menawarkan model tata kelola berbasis nilai yang tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga terstruktur dan aplikatif untuk reformasi birokrasi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi konseptual dan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis implementasi tata kelola berbasis syariah dalam meningkatkan etika administrasi publik melalui eksplorasi nilai, prinsip normatif, dan konstruksi konseptual yang mendasari integrasi syariah dalam administrasi publik modern [39, 40]. Dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta literatur terkait maqasid al-shariah, *good governance*, dan etika administrasi publik yang terbit setelah tahun 2022, yang dikumpulkan melalui identifikasi, seleksi, dan klasifikasi berdasarkan relevansi, kredibilitas, serta kontribusi teoretis, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dan analisis konseptual untuk mengidentifikasi keterkaitan prinsip keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan maslahah dengan integritas, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi, sementara validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber literatur dan konsistensi interpretasi teoretis guna merumuskan model konseptual tata kelola berbasis syariah yang sistematis dan aplikatif dalam konteks administrasi publik Indonesia [41, 42].

3.1. Desain dan Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam studi ini disajikan secara sistematis pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Penelitian

Tahap Penelitian	Kegiatan Utama	Output yang Dihasilkan
Identifikasi Masalah	Analisis isu etika administrasi publik dan kebutuhan integrasi nilai syariah	Rumusan masalah penelitian
Pengumpulan Literatur	Seleksi jurnal, buku, dan regulasi terbaru yang relevan	Basis data literatur terkurasi
Analisis Konseptual	Analisis hubungan prinsip syariah dan indikator etika publik	Kerangka konseptual penelitian
Sintesis Model	Perumusan model implementasi tata kelola berbasis syariah	Model konseptual tata kelola syariah

Tabel 1 menjelaskan desain dan tahapan penelitian yang digunakan dalam studi ini secara sistematis dan terstruktur [43, 44]. Tahapan dimulai dari identifikasi masalah yang berfokus pada analisis isu etika administrasi publik serta urgensi integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem tata kelola pemerintahan. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan literatur melalui proses seleksi sumber ilmiah yang relevan, kredibel, dan mutakhir untuk memastikan kualitas landasan teoritis penelitian. Setelah itu dilakukan analisis konseptual guna mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip tata kelola berbasis syariah dan indikator etika administrasi publik [45, 46]. Tahap akhir berupa sintesis model yang menghasilkan kerangka konseptual implementasi tata kelola berbasis syariah. Dengan demikian, Tabel 1 menegaskan bahwa penelitian dilakukan melalui prosedur ilmiah yang runtut dan terarah sehingga mendukung validitas dan kedalaman analisis.

3.2. Variabel Konseptual Penelitian

Penelitian ini bersifat konseptual sehingga variabel yang digunakan berupa konstruk normatif yang dianalisis secara teoritis, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut [47, 48].

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel Utama	Dimensi	Indikator Konseptual
Tata Kelola Berbasis Syariah	Nilai Normatif	Keadilan, Amanah, Maslahah
	Nilai Operasional	Transparansi, Tanggung Jawab
Etika Administrasi Publik	Integritas	Kepatuhan moral, anti korupsi
	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban kinerja

Tabel 2 menggambarkan variabel konseptual yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini, yang terdiri atas variabel tata kelola berbasis syariah dan etika administrasi publik. Tata kelola berbasis syariah dijabarkan ke dalam dimensi nilai normatif seperti keadilan, amanah, dan maslahah, serta dimensi nilai operasional seperti transparansi dan tanggung jawab. Sementara itu, etika administrasi publik diuraikan dalam dimensi integritas dan akuntabilitas yang mencerminkan perilaku dan kinerja aparatur negara. Tabel ini menunjukkan keterkaitan konseptual antara prinsip-prinsip syariah dan indikator etika birokrasi modern, sehingga menjadi dasar analisis dalam merumuskan model implementasi tata kelola berbasis syariah yang relevan dengan penguatan integritas dan kualitas administrasi publik [49, 50].

3.3. Model Alur Metode Penelitian

Alur tahapan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini disajikan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Konsep Tata Kelola Berbasis Syariah dalam Perspektif Kontemporer

Gambar 3 menampilkan model alur metode penelitian yang digunakan dalam studi ini secara sistematis dan terstruktur. Alur dimulai dari tahap identifikasi masalah yang berfokus pada analisis isu etika administrasi publik serta kebutuhan integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola pemerintahan [51, 52]. Tahap berikutnya adalah pengumpulan literatur melalui seleksi sumber ilmiah yang relevan dan mutakhir sebagai landasan teoritis penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis konseptual dengan teknik *content analysis* untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab dengan indikator etika administrasi publik. Tahap akhir berupa sintesis model yang menghasilkan model konseptual implementasi tata kelola berbasis syariah yang sistematis dan aplikatif dalam konteks administrasi

publik Indonesia. Secara keseluruhan, gambar ini menegaskan bahwa metode penelitian dilaksanakan secara bertahap, logis, dan berbasis analisis ilmiah guna menghasilkan kontribusi konseptual yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Prinsip-Prinsip Syariah yang Relevan dengan Etika Administrasi Publik

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa terdapat empat prinsip utama dalam tata kelola berbasis syariah (*sharia governance*) yang paling relevan dengan etika administrasi publik, yaitu keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi (*syafafiyyah*), dan akuntabilitas (*mas'uliyyah*). Prinsip keadilan menekankan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional tanpa diskriminasi. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab moral pejabat publik dalam menjalankan kewenangan. Transparansi menuntut keterbukaan informasi publik, sementara akuntabilitas mengharuskan adanya pertanggungjawaban administratif dan moral. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat prinsip tersebut memiliki korelasi langsung dengan indikator etika administrasi publik modern seperti *good governance*, pelayanan publik yang profesional, dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.

4.2. Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah dengan Konsep *Good Governance*

Berdasarkan hasil *content analysis* terhadap literatur tahun 2022 ke atas, ditemukan bahwa prinsip syariah tidak hanya kompatibel, tetapi juga memperkuat konsep *good governance*. Prinsip keadilan selaras dengan prinsip *equity and rule of law*. Amanah berkorelasi dengan *integrity and ethical leadership*. Transparansi memperkuat aspek public disclosure, sedangkan akuntabilitas mendukung sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian dalam abstrak bahwa hukum ekonomi syariah dapat berperan sebagai fondasi normatif dalam membangun sistem ekonomi dan administrasi publik yang sehat di Indonesia. Integrasi nilai-nilai syariah bukan bersifat simbolik, melainkan substantif dan aplikatif.

4.3. Hasil Sintesis Model Konseptual Tata Kelola Berbasis Syariah

Berdasarkan tahapan metode penelitian, hasil sintesis menghasilkan model konseptual tata kelola administrasi publik berbasis syariah yang terdiri dari tiga lapisan utama:

- Lapisan Normatif: Berisi prinsip dasar syariah (keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas).
- Lapisan Implementatif: Berisi kebijakan publik, sistem pelayanan, dan manajemen keuangan negara.
- Lapisan Evaluatif: Berisi mekanisme pengawasan, audit, dan partisipasi masyarakat.

Model ini menunjukkan bahwa integrasi nilai syariah dapat diterapkan secara sistematis melalui regulasi, penguatan etika aparatur, serta sistem kontrol kelembagaan. Hasil ini diperoleh melalui proses reduksi data, kategorisasi konsep, dan interpretasi tematik.

4.4. Implikasi terhadap Sistem Ekonomi dan Administrasi Publik Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam administrasi publik berpotensi meningkatkan:

- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- Efektivitas kebijakan publik.
- Stabilitas sistem ekonomi nasional.
- Pencegahan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab secara komprehensif pertanyaan pada abstrak bahwa hukum ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung sistem ekonomi yang sehat melalui penguatan etika administrasi publik. Hasil metode penelitian membuktikan bahwa terdapat kesesuaian konseptual dan peluang implementasi yang signifikan dalam konteks Indonesia.

5. IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi manajerial dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi (*syafafiyyah*), dan akuntabilitas (*mas'uliyyah*), ke dalam sistem administrasi publik tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diterjemahkan secara operasional dalam tata kelola organisasi pemerintahan. Secara manajerial, pimpinan instansi publik perlu menjadikan nilai amanah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam pengelolaan anggaran, perencanaan program, dan distribusi pelayanan publik agar terhindar dari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Prinsip keadilan menuntut manajer publik untuk menerapkan sistem evaluasi kinerja dan distribusi sumber daya yang objektif, berbasis kebutuhan masyarakat, serta tidak diskriminatif. Sementara itu, transparansi harus diimplementasikan melalui digitalisasi sistem informasi, keterbukaan laporan keuangan, serta akses publik terhadap proses pengambilan kebijakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Akuntabilitas juga perlu diperkuat melalui mekanisme audit internal dan eksternal yang konsisten, sistem pengawasan berbasis indikator kinerja, serta budaya organisasi yang mendukung pertanggungjawaban moral dan profesional.

Dengan demikian, model tata kelola berbasis syariah yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dijadikan kerangka strategis bagi para pengambil kebijakan untuk membangun sistem administrasi publik yang lebih berintegritas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penerapan model ini juga diharapkan mampu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan organisasi yang berlandaskan nilai-nilai etika, sekaligus mendukung penguatan stabilitas sistem ekonomi nasional secara menyeluruh.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi (*syafafiyyah*), dan akuntabilitas (*mas'uliyyah*), memiliki relevansi yang kuat dan aplikatif dalam memperkuat etika administrasi publik di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis literatur sistematis dan *content analysis*, ditemukan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya sejalan dengan konsep *good governance*, tetapi juga mampu memperkaya dimensi moral dan normatif dalam tata kelola pemerintahan. Sintesis model konseptual yang dihasilkan menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dapat dilakukan melalui tiga lapisan utama, yaitu normatif, implementatif, dan evaluatif, sehingga menciptakan sistem administrasi publik yang lebih berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menjawab pertanyaan utama dalam abstrak bahwa hukum ekonomi syariah berperan strategis dalam mendukung sistem ekonomi yang sehat melalui penguatan etika administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian konseptual antara nilai-nilai syariah dan prinsip tata kelola modern, serta potensi implementasi yang signifikan dalam konteks Indonesia. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan berbasis studi literatur tanpa pengujian empiris di lapangan. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif dampak implementasi prinsip syariah terhadap kinerja institusi publik, sehingga ruang generalisasi masih terbatas pada tataran teoritis.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan empiris melalui metode kuantitatif atau *mixed-method* guna menguji pengaruh implementasi nilai-nilai syariah terhadap indikator kinerja administrasi publik, seperti tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat. Penelitian mendatang juga dapat memperluas objek kajian pada institusi pemerintah daerah maupun lembaga keuangan publik untuk melihat variasi implementasi di berbagai konteks. Selain itu, pengembangan model evaluasi berbasis indeks tata kelola syariah dapat menjadi kontribusi baru dalam memperkuat integrasi antara prinsip agama dan praktik administrasi modern secara lebih terukur dan aplikatif.

7. DEKLARASI

7.1. Tentang Penulis

Fitra Putri Oganda (FP) https://orcid.org/0000-0002-4590-0657

Sheila Aulia Anjani (SA) https://orcid.org/0009-0007-9121-1151

Ardivan Avandi (AA) https://orcid.org/0009-0001-7535-4298

Ammar Hussein (AH) https://orcid.org/0009-0005-7467-0415

7.2. Kontribusi Penulis

Konseptualisasi dilakukan oleh FP. Metodologi dikembangkan oleh SA, sementara pengembangan perangkat lunak ditangani oleh AA. Validasi dilakukan oleh AH dan FP, sedangkan analisis formal dikerjakan oleh SA. FP bertanggung jawab atas investigasi dan pengelolaan data, sementara sumber daya disediakan oleh AA. Penulisan draf awal diselesaikan oleh SA dan AH, dengan tinjauan serta penyuntingan dilakukan oleh FP dan SA. Visualisasi dikerjakan oleh AA. Seluruh penulis, yaitu FP, SA, AA dan AH, telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip yang dipublikasikan.

7.3. Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis yang bersangkutan.

7.4. Pendanaan

Para penulis tidak menerima dukungan finansial apa pun untuk penelitian, penulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

7.5. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan, kepentingan finansial yang bersaing, atau hubungan pribadi yang dapat memengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] S. Overman and T. Schillemans, "Toward a public administration theory of felt accountability," *Public Administration Review*, vol. 82, no. 1, pp. 12–22, 2022.

[2] B. J. Perlman, C. Reddick, and T. Demir, "A compliance—integrity framework for ethics management: An empirical analysis of local government practice," *Public Administration Review*, vol. 83, no. 4, pp. 823–837, 2023.

[3] I. B. M. P. Dharmika and I. N. Subanda, "The effectiveness of public services in realizing good governance," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 5, no. 1Sp, pp. 77–83, 2023.

[4] K. S. Weißmüller and A. Zuber, "Understanding the micro-foundations of administrative corruption in the public sector: Findings from a systematic literature review," *Public Administration Review*, vol. 83, no. 6, pp. 1704–1726, 2023.

[5] S. Ahmad, A. J. Qamar, M. A. A. Bhatti, and U. Bashir, "Integrating islamic ethics with modern governance: A comprehensive framework for accountability across religious, social, and economic dimensions," *Al-Irfan*, vol. 8, no. 15, pp. 51–79, 2023.

[6] Y. N. Qintharah and F. L. Utami, "Determinants on environmental disclosure moderating by integrated corporate governance," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 5, no. 1Sp, pp. 22–37, 2023.

[7] F. Machmud, D. Kurniasih, and T. Tobirin, "Ethics of public administration," *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, vol. 7, no. 1, pp. 1349–1356, 2023.

[8] A. HUSAIN, A. J. NORI, A. E.-M. M. U. EL, I. NIZAM *et al.*, "Integrating islamic governance ethics into decentralisation in the maldivian context," *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 7, no. 1, pp. 49–61, 2026.

[9] A. Pratama and A. Wijaya, "Implementasi sistem good corporate governance pada perangkat lunak berbasis website pt. pusaka bumi transportasi," *Technomedia Journal*, vol. 7, no. 3 Februari, pp. 340–353, 2023.

[10] A. Aulia, T. Lestari *et al.*, "The existence of universal values of islamic political ethics in the formation of public policy," *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies*, vol. 2, no. 2, pp. 136–147, 2024.

[11] A. R. Azdi, R. H. Nurwahid *et al.*, "Korupsi dan kegagalan etika dalam administrasi publik: dampak pada pelayanan masyarakat," *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, vol. 11, no. 2, pp. 776–791, 2024.

[12] H. A. Winata and F. Simon, "Influence of profitability, audit quality, and corporate governance on earnings management," *APTISI Transactions on Management*, vol. 8, no. 2, pp. 93–104, 2024.

[13] M. Aydin *et al.*, "Smart public administration and data-driven decision-making: Opportunities and risks for modern governance," *Journal of Public Administration Research*, vol. 2, no. 2, pp. 18–36, 2026.

[14] B. Yadav, "Ethics in public administration: Why integrity matters?" *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, vol. 9, no. 1, pp. 282–286, 2024.
[15] C. F. Anggraini, N. M. Estiyanti, and P. A. C. Dewi, "Governance audit using cobit 5 in cv. xyz on accounting information system," *ADI Journal on Recent Innovation*, vol. 4, no. 2, pp. 201–209, 2023.
[16] R. E. Putera, T. R. Valentina, and T. H. Purnama, "Public administration ethics education to build anti-corruption integrity among students of smp n 13 padang," *Warta Pengabdian Andalas*, vol. 31, no. 2, pp. 303–311, 2024.
[17] Y. N. Nani, J. Abdussamad, S. Y. Mozin, and R. Tohopi, "Integrating ethical values and new public services: Strengthening reform and anti-corruption in indonesia," *Journal of Governance and Public Policy*, vol. 12, no. 2, pp. 236–249, 2025.
[18] M. B. Karo, B. P. Miller, and O. A. Al-Kamari, "Leveraging data utilization and predictive analytics: Driving innovation and enhancing decision making through ethical governance," *International Transactions on Education Technology (ITEE)*, vol. 2, no. 2, pp. 152–162, 2024.
[19] M. F. Ardyansyah, A. L. A. Syah, and S. F. Amalia, "Maqashid syari'ah dalam kebijakan publik: Analisis implementasi prinsip islam dalam kebijakan pemerintah di indonesia," *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 4, no. 3, pp. 227–240, 2025.
[20] A. Joko, "Determination of auditor experience, task-specific knowledge, and implementation of institution governance against fraud prevention," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 5, no. 1, pp. 9–18, 2023.
[21] T. Ruddle, D. Gates, and D. Hart, "Do no harm: A foundational moral framework for public administration," *Public Administration Review*, vol. 85, no. 6, pp. 1571–1581, 2025.
[22] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. (2025) Integritas asn dalam perspektif fiqh siyasah. KPU Kabupaten Purwakarta. Artikel pada situs resmi pemerintah Indonesia. [Online]. Available: https://kab-purwakarta.kpu.go.id/blog/read/9115_integritas-asn-dalam-perspektif-fiqh-siyasah
[23] Z. Abdurrahman, "Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention," *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 1–19, 2025.
[24] M. A. Ahwadzy, A. Baihaqi, M. Thoha, A. R. Muqtafa, R. Ainurrofiq, B. Al Bustomi, and M. Khoirifo, "Fiqh of bureaucracy and public governance in indonesia: A new paradigm based on maqasid al-shariah," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, vol. 14, no. 2, pp. 197–222, 2025.
[25] V. V. Febiandini and M. S. Sony, "Analysis of public administration challenges in the development of artificial intelligence industry 4.0," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 4, no. 2, pp. 164–168, 2023.
[26] M. F. Rozi and S. Anam, "Konsep good governance berbasis maqashid syariah dalam administrasi publik indonesia," *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2026.
[27] U. Rahardja, N. Ani, and N. Leonie, "" inclusively creative" campuses: An orange technology framework for humanistic creative-economy higher education in indonesia," *CreatiCampus*, vol. 1, no. 1, 2026.
[28] M. R. Hanifa, R. D. Wahyunengseh, and D. G. Suharto, "Beyond compliance: A systematic review of ethics, accountability, and transparency in indonesian governance," *Policy & Governance Review*, vol. 10, no. 1, pp. 85–102, 2026.
[29] A. Ruangkanjanases, A. Khan, O. Sivarak, U. Rahardja, and S.-C. Chen, "Modeling the consumers' flow experience in e-commerce: The integration of ecm and tam with the antecedents of flow experience," *Sage Open*, vol. 14, no. 2, p. 21582440241258595, 2024.
[30] E. Qutieshat, M. Al Adwan, and M. Khater, "Artificial intelligence in islamic law: Ethics, governance, and accountability," *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, vol. 4, no. 2, pp. 467–714, 2026.
[31] R. Widayanti, M. H. R. Chakim, C. Lukita, U. Rahardja, and N. Lutfiani, "Improving recommender systems using hybrid techniques of collaborative filtering and content-based filtering," *Journal of Applied Data Sciences*, vol. 4, no. 3, pp. 289–302, 2023.
[32] M. S. B. A. Aziz, "Maqasid al-shariah and the sustainable development goals: A governance research agenda beyond 2030," *International Journal of Shariah in Economics and Governance*, vol. 1, no. 1, pp. 17–38, 2026.
[33] H. Firdausi and M. I. Ghufron, "Maqasid al shariah guided public policy advancing human well-being: Islamic economics frameworks," *Islamic Finance and Economic Insights*, vol. 2, no. 2, pp. 80–92, 2026.
[34] N. Lutfiani, M. H. R. Chakim, S. Wijono, U. Rahardja, H. D. Purnomo, and A. Rizky, "A machine learning

framework for startup investor matchmaking to enhance sustainable innovation," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 8, no. 3, pp. 1147–1158, 2026.
[35] A. Wahab, A. Kuswanjono, and I. Mahdiya, "Halal industry and islamic epistemology: Implications for policy, ethics, and global practices," *Journal of Islamic Economic Laws*, vol. 9, no. 01, pp. 144–169, 2026.
[36] A. Rahmawati and B. Satrio, "Re-actualization of the concept of al-maslahah al-mursalah in sharia-based public policy formulation," *Samarinda International Journal of Islamic Studies (SIJIS)*, pp. 89–100, 2024.
[37] E. E. Djajasasana and J. R. K. Bokau, "Utilization of micro influencers and engagement in social media to gain cadet candidates," *ADI Journal on Recent Innovation*, vol. 6, no. 1, pp. 1–7, 2024.
[38] I. Pérez-Durán, "Twenty-five years of accountability research in public administration: Authorship, themes, methods, and future trends," *International Review of Administrative Sciences*, vol. 90, no. 3, pp. 546–562, 2024.
[39] W. A. Kuncoro, E. Sediyono, and K. D. Hartomo, "Analisis kolaborasi hubungan karyawan menggunakan metode social network analysis (studi kasus dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten boyolali)," *Jurnal Transformatika*, vol. 20, no. 2, pp. 60–69, 2023.
[40] M. A. Rizki, "Sharia-based public service administration in aceh: A normative-conceptual study from an islamic perspective," *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 1, pp. 33–52, 2025.
[41] U. Rahardja, M. T. D. S. Putri, N. Septiani, F. Amelia, A. Avandi, and R. Evans, "Human centered legal governance for autonomous ai in digital societies," *Legal Autonomous Web-based Governance (LAW)*, vol. 1, no. 1, pp. 29–41, 2026.
[42] T. Luhuringbudi, Y. Komarudin, M. A. Masuwd, M. Zaki *et al.*, "Islamic ethics and modern governance: The case of mental revolution in papua's religious affairs office," *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, vol. 4, no. 1, pp. 116–143, 2025.
[43] S. A. Sibagariang, N. Septiani, and A. Rodriguez, "Enhancing educational management through social media and e-commerce-driven branding," *International Journal of Cyber and IT Service Management (IJCITSM)*, vol. 5, no. 2, pp. 235–245, 2025.
[44] Q. U. A. Saleem, S. Fatima, and H. Siddiqui, "Islamic governance in legal contexts: Navigating challenges and opportunities in contemporary administration," *Journal of Law, Social and Management Sciences*, vol. 3, no. 2, pp. 8–17, 2024.
[45] R. T. Utami, V. H. Lubis, N. P. L. Santoso, A. Rizky, M. A. Komara, L. Suryadi *et al.*, "Blockchain technology for securing electronic health records and enhancing data privacy," in *2025 4th International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT)*. IEEE, 2025, pp. 1–7.
[46] A. S. Che Mat and M. N. Abd Halim, "Integrating maqasid al-shariah in the e-procurement system: A governance framework for shariah compliance in malaysia's public sector." *Architecture Image Studies (AIS)*, vol. 6, no. 3, p. 347, 2025.
[47] A. S. Bist, A. Jaya, A. Rizky, M. A. Komara, and K. Moyo, "Data mining techniques in blockchain using machine learning algorithms," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 6, no. 2, pp. 168–179, 2027.
[48] C. V. Tabansa, D. N. Aprilya, T. N. Nyoman, F. A. Adisty, A. T. E. Debataraja, and B. Baidhowi, "Penerapan nilai al-'adālah dalam good governance islam dalam menjawab tantangan keadilan pemerintah modern: Analisis konseptual atas integrasi nilai keadilan islam dalam tata kelola pemerintahan kontemporer," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, vol. 2, no. 6, pp. 389–401, 2025.
[49] E. R. Rahayu, A. Aprillia, R. Z. Ikhsan, A. Adiwijaya, A. Kumara *et al.*, "Cybersecurity in the age of iot and developing frameworks for securing smart devices and networks," *Journal of Computer Science and Technology Application*, vol. 2, no. 1, pp. 46–54, 2025.
[50] M. F. N. Dewata *et al.*, "Kontribusi hukum islam terhadap reformasi birokrasi: Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas," *Esensi Hukum*, vol. 6, no. 1, pp. 15–30, 2024.
[51] N. P. L. Santoso, D. Khairani, S. U. Masruroh, A. Rizky, and A. Jaiswal, "Human centered artificial intelligence through gdpr compliant data science workflow implementation," *Journal of Orange Technology*, vol. 3, no. 1, pp. 37–48, 2026.
[52] C. H. Trinita, "Implementasi hukum ekonomi syariah dalam penyelenggaraan good corporate governance bank syariah," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 3, no. 3, 2025.